

**Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan***Effectiveness Of Preparation Of Property Requirements Plans Regional Owned in The Regional Financial And Asset Management Agency Of South Sumatra Province***Yoranda Tiara Sati <sup>1)</sup>, Syaparman <sup>2)</sup>, Atrika Iriani <sup>3\*)</sup>**<sup>1</sup> Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>2</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia<sup>3</sup> STISIPOL Candradimuka, Indonesia

\*E-mail correspondences: atrikairiani@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektivitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel. Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel difokuskan pada Efektivitas Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel yang meliputi: pendekatan sumber (*resource approach*), pendekatan proses (*process approach*), pendekatan sasaran (*goals approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini analisis menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu kondensasi, sajian data, penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan, berdasarkan Pendekatan Sumber (*Resource Approach*), waktu penetapan RKBMD seringkali terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan, dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel khususnya di Bidang Kesekretariatan sehingga dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Pemerintah Provinsi masih belum optimal. Sarana yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel sudah cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, hanya saja masih kurang dalam hal pembangunan aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan dan belum tersedianya standar barang dan standar kebutuhan, yang disebabkan aplikasi untuk penyusunan RKBMD belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan. Berdasarkan Pendekatan Proses (*Process Approach*), kendala dalam penyusunan RKBMD ini antara lain disebabkan RKBMD lebih bersifat teknis dan lebih dapat menggambarkan *real* belanja. Dalam RKBMD spesifikasi barang harus jelas, dan untuk penyusunan kebutuhan pemeliharaan RKBMD diperlukan pengetahuan dan kemampuan teknis tentang kondisi barang. Oleh sebab itu, maka untuk penyusunan RKBMD/RKPBMD *user* atau pihak yang terkait dengan barang yang dibutuhkan, seperti: operator mesin, teknisi, pejabat teknis, dan lain-lain harus dilibatkan. Berdasarkan Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*).

**Kata Kunci:** Efektivitas, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to analyze the effectiveness of preparing regional property needs plans (RKBMD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. The effectiveness of RKBMD preparation at BPKAD of South Sumatra Province is focused on the Effectiveness of RKBMD preparation at BPKAD of South Sumatra Province which includes: source approach, process approach,*

*goals approach. This study uses a qualitative approach with a descriptive explanation level.. Data analysis techniques in this study were analyzed using an interactive model which includes three components of analysis, namely condensation, data presentation, drawing conclusions. The results of the study show that, based on the Resource Approach, the time for determining the RKBMD is often late from the predetermined schedule, due to the lack of human resources owned by the BPKAD of the South Sumatra Province, especially in the Secretarial Sector so that the preparation of the Provincial Government Property Needs Plan is still not optimal. The facilities owned by BPKAD of South Sumatra Province are quite adequate in carrying out government duties and functions, it's just that they are still lacking in terms of developing applications that can facilitate work and the unavailability of standard goods and standard needs, which is due to the application for preparing RKBMD not yet integrated with financial applications. Based on the Process Approach, the obstacles in preparing the RKBMD are partly due to the fact that the RKBMD is more technical in nature and better able to describe real spending. In the RKBMD, specifications for goods must be clear, and for the preparation of RKPBM maintenance requirements, knowledge and technical skills regarding the condition of the goods are required. Therefore, for the preparation of RKBMD/RKPBM users or parties related to the goods needed, such as: machine operators, technicians, technical officials, and others must be involved. Based on the Goals Approach, the Property User and/or the Proxy of the Property User proposes an RKBMD for the procurement of Provincial Government-Owned Goods guided by goods standards and requirements standards, then the RKBMD that has been determined is a requirement in the preparation and discussion of the Work Plan and PD Budget by the Government Budget Team Region of South Sumatra Province.*

**Keywords:** *Effectiveness, Regional Property Needs Plan (RKBMD)*

## **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan harapan yang cerah bagi para pengembang secara keseluruhan, dimana setiap daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi, salah satunya asas desentralisasi. Perubahan alokasi dana dilaksanakan secara tepat, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan peluang, kondisi dan kebutuhan daerah.

Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik untuk

memperoleh informasi yang dapat diandalkan untuk laporan keuangan daerah. Pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan efisien, efektif, dan ekonomis sehingga pengamanan kekayaan daerah dapat terjaga dengan baik.( Hartoyo, Nafsi. 2015).

BPKAD Provinsi Sumsel harus memperhatikan dan mematuhi manajemen inventarisasi, menentukan jenis, kualitas dan jumlah peralatan yang dibutuhkan, serta memastikan dan menggunakan kantor untuk pasca perencanaan, pengadaan peralatan dan distribusi di kantor. Peralatan yang digunakan dalam operasional, menyerahkan perbekalan sesuai dengan anggaran yang ada, menyimpan dan memelihara peralatan, mengumpulkan dan mengolah data perlengkapan kantor

sesuai dengan standar Perda Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sumsel,

Salah satu permasalahan utama yang sering ditemui dalam penyusunan rencana distribusi kebutuhan, pengadaan dan penambahan barang BPKAD Provinsi Sumsel keuangan audit BPK, Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang menjadi acuan utama penyusunan APBD tidak mencantumkan rencana kebutuhan sebagai salah satu dokumen dasar penyusunan APBD.

Seolah-olah persoalan pengelolaan barang dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, seringkali hal itu, dilakukan hanya untuk memenuhi prinsip pemeriksaan standar laporan keuangan dalam audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK., tak jarang mekanisme penyusunan terbalik dari yang seharusnya, yaitu disusun berdasarkan RKA-SKPD,

Identifikasi masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah :

- a. Kurang maksimalnya mekanisme didalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan di Kantor BPKAD Provinsi Sumsel
- b. Kurangnya SDM yang dimiliki Kantor BPKAD Provinsi Sumsel khususnya di Bidang Kesekretariatan sehingga dalam penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan pendistribusian barang masih belum optimal.

## TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu, yang telah

ditentukan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan barang yang berlipat ganda bagi jasa kegiatan yang dilakukan. (Siagian, 2001: 24)

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi (Martani dan Lubis 2007), yaitu:

- a) Pendekatan sumber (*Resource Approach*) yaitu pengukuran efisiensi masukan. Pendekatan tersebut mengutamakan keberhasilan organisasi dalam memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik yang memenuhi kebutuhan organisasi.
- b) Pendekatan proses (*Process Approach*), melihat seberapa efektif implementasi program dari semua fungsi dan mekanisme organisasi
- c) Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*), yang menitikberatkan pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai hasil (*output*) sesuai dengan rencana

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Definisi Operasional adalah pedoman kerja tentang mengukur suatu variabel (Singarimbun dan Effendi, 1995: 46). Kajian ini diukur dengan indikator Teori Lubis dan Martani (2007: 55) dan Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumsel.

Menurut Sugiyono (2007: 253) data dapat dikumpulkan dalam lingkungan yang berbeda, dari sumber yang berbeda dan dengan cara yang berbeda pula. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi Observasi,

wawancara dan dokumentasi. Materi penelitian ini dianalisis dalam beberapa tahapan menurut teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) yaitu analisis data dalam tiga tahap: ringkasan data, penyajian data dan melakukan atau memeriksa kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pendekatan Sumber** (*Resource Approach*)

Waktu penetapan RKBMD sering tertunda karena SDM BPKAD Provinsi Sumsel belum mencukupi khususnya di bidang kesekretariatan, sehingga penyiapan RKBMD belum optimal

#### **a. Dana**

Anggaran penyusunan RKBMD BPKAD Provinsi Sumsel hanya dialokasikan dalam bentuk dokumen RKBMD. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi masalah atau hambatan bagi BPKAD Provinsi untuk melakukan koordinasi

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Dalam hal ini, fasilitas yang dimiliki oleh BPKAD Provinsi Sumsel sudah cukup memadai untuk memenuhi tugas dan fungsi pemerintahan, namun masih kurang dalam pengembangan aplikasi penunjang pekerjaan dan minimnya perlengkapan standar. Kebutuhan barang dan standar hasil pernohonan pendahuluan RKBMD tidak terintegrasi kedalam aplikasi keuangan. Selain itu, belum ada standar persyaratan dan standar barang yang dijadikan acuan dalam penyusunan RKBMD.

### **Pendekatan Proses** (*Process Approach*)

#### **Mekanisme Penyusunan RKBMD**

Sebagai wakil pengelola barang, BPKAD berperan sebagai pimpinan teknis seluruh kegiatan pengelolaan barang milik daerah, termasuk berkoordinasi dengan PD yang merupakan pengguna barang terkait penyusunan RKBMD. Selain itu, hal ini juga berlaku pada bagian perencanaan yang kiranya lebih memahami rencana masing-masing PD dan RKA. Dalam RKBMD, spesifikasi barang harus jelas dan diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang kondisi barang untuk menyusun persyaratan pembelian (RKBMD). Oleh sebab itu, pengguna RKBMD/RKPBMD atau pihak-pihak yang terkait dengan barang yang dibutuhkan misal : operator mesin, teknisi, petugas teknis dan lainnya, harus dilibatkan dalam penyiapannya.

#### **Ruang Lingkup Penyusunan RKBMD**

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan mencakup Perencanaan Pengadaan, Pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan barang milik daerah.

### **Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*)**

#### **Tersusunnya RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel**

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan kepada RKBMD untuk pengadaan barang milik pemerintah daerah sesuai dengan standar komoditas dan persyaratan standar. Kuasa pengguna barang dan/atau pengguna barang barang mengusulkan kepada RKBMD untuk menyediakan barang milik pemerintah daerah dengan mengacu pada standar komoditas persyaratan standar yang dipersyaratkan oleh RKBMD tersebut.

### **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa Penyusunan RKBMD di BPKAD Provinsi Sumsel cukup efektif, meski mengalami beberapa kendala, antara lain:

- a. Berdasarkan Pendekatan Sumber (*Resource Approach*), waktu penetapan RKBMD sering tertunda karena BPKAD Provinsi Sumsel khususnya di Bidang Kesekretariatan memiliki SDM masih belum optimal. Sarana yang dimiliki BPKAD Provinsi Sumsel sudah cukup memadai untuk memenuhi tugas dan fungsi pemerintahan, hanya saja masih kurangnya pengembangan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan serta belum ada standar barang dan standar kebutuhan, yang disebabkan aplikasi penyusunan RKBMD belum terintegrasi dengan aplikasi keuangan
- b. Dari Pendekatan berbasis Proses (*Process Approach*), hambatan

penyusunan RKBMD ini diantaranya karena RKBMD lebih bersifat teknis dan mampu menggambarkan pengeluaran yang sebenarnya. Dalam RKBMD, spesifikasi barang harus jelas dan diperlukan pengetahuan dan keterampilan teknis tentang kondisi barang. Oleh karena itu, pengguna RKBMD/RKPBMD ataupun pihak terkait dengan barang yang dibutuhkan, misal: operator mesin, teknisi, petugas teknis, dan lain-lain harus dilibatkan dalam penyiapannya.

- c. Berdasarkan Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*), Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengusulkan RKBMD pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi mempedomani standar barang dan standar kebutuhan, selanjutnya RKBMD yang telah ditetapkan merupakan persyaratan dalam penyusunan serta pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amirullah, Haris Budiyo. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- As'ad, M. 2002. *Ilmu Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty
- Dharma, Setyawan Salam. 2004. *Manajemen Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Dwiyanti. 1995. *Konsep Kinerja Organisasi Publik*. Jakarta: Jaya Abadi
- Georgopolous dan Tannenbaum. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Hasibuan, Melayu. 2001. *Manajemen*

- Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ivancevich, Jhon M. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kacung Marijan. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Koontz, Harold. 1966. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bhratara
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 2007. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro)*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Muamar Alkadafi. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Nitisemito, Alex S. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pengantar*, Jakarta: Ghali Indonesia
- Nurma. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 26 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- Prajudi Atmosudijono. 2011. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Riyono, Sugeng. 2013. *Pemanfaatan Aset Daerah*. Jurnal Administrasi Publik Desember, Vol.11, No.2, Hal.237
- Rasyidah. 2012. *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintahan Kota Padang*. Jurnal UNP. Sumatera Barat.
- Sarman. 2011. *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Rineka Citra
- Sondang P. Siagian. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta
- Sulistiyani, Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Garaha ilmu
- T. Hani Handoko. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFTE Tebaik, Cetakan Kedua, Salemba Empat: Jakarta.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Virna Museliza. 2018. *Manajemen Logistik Sektor Publik*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja. 2010. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Pro HAW*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Yusuf, M. 2011. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan*

*Keuangan Daerah*  
Yanison MN, SE, MM. 2015.  
*Menyusun Rencana Kebutuhan*  
*Barang Milik Daerah (RKBMD)*  
*Yang Efektif.* Jurnal  
Ilmiah.Provinsi Sumatera Utara